

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 19 Mei 2009 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah resmi disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI), untuk mempermudah setiap badan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, dan masih berlaku hingga saat ini.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018:1) Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan laporan keuangan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan laporannya diterbitkan untuk tujuan umum. Pengguna eksternalnya sendiri yaitu pemilik yang tidak langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Salah satunya adalah badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan sebuah lembaga desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan potensi yang ada di desa. Dengan didirikannya BUMDesa “Podho Joyo” salah satunya yaitu dapat mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan modal sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan pendapatan, selain itu keberadaan BUMDesa membawa perubahan dibidang ekonomi dalam bentuk pendapatan asli daerah, dimana keuntungan bersih BUMDesa dialokasikan untuk pemasukan daerah.

BUMDesa “Podho Joyo” sendiri merupakan suatu usaha yang melayani segala macam usaha yaitu mulai dari: simpan pinjam, pembayaran listrik, pengelolaan pasar, pengelolaan

sampah, pertokoan, yang merupakan milik masyarakat desa yang dikelola masyarakat desa. Dalam penyusunan laporan keuangannya harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan, yaitu laporan keuangannya harus mengacu pada pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Merujuk pada surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 bahwa sehubungan dengan pemberlakuan IFRS maka dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Serta ditemukan pula bahwa SAK No.27 jika dapat diterapkan dengan baik dapat membawa dampak positif bagi UMKM.

Adanya penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada BUMDesa adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. BUMDesa merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas dan dasar hukum, Undang-undang Republik Indonesia No. 1/2013-lembaga keuangan Mikro pasal 29 menjelaskan bahwa penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan agar BUMDesa memiliki kepercayaan dari semua pihak, Jika tidak terdapat menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku, perusahaan dapat saja menyajikan laporan keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini terjadi pada badan usaha milik desa dalam penerapan penyajian laporan keuangannya dalam pos-posnya belum sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi para pengguna karena akan menyulitkan untuk memahami laporan keuangan karena laporan keuangan menjadi dasar dari

berbagai keputusan yang hendak dibuat oleh manajer serta pengaruhnya terhadap investor. Dengan adanya penyajian suatu laporan keuangan yang tepat, maka akan tercapailah suatu pola perekonomian yang sehat dan terstruktur. Sebagai badan usaha yang cukup besar dan terbaik seharusnya mampu mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik, Dengan adanya penyajian suatu laporan keuangan yang tepat, maka akan tercapailah suatu pola perekonomian yang sehat dan terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan di BUMDesa “Podho Joyo”?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk memperoleh gambaran tentang penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan di BUMDesa “Podho Joyo”!

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BUMDesa

dengan adanya penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan terhadap badan usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan Laporan Keuangan, dan menyempurnakan dalam penyusunan Laporan Keuangan di BUMDesa.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui kondisi nyata dalam tata cara pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dan dapat menambah wawasan tentang penerapan akuntansi khususnya pembuatan laporan keuangan.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

fokus penelitian ini adalah pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan, dalam posnya terdapat permasalahan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah Standar yang berlaku. Dan pembatasan lokasi penelitian dilakukan di BUMDesa "Podho Joyo" di desa Sukorejo, kec. Sidayu, Kab. Gresik dengan keterbatasan yang dilakukan peneliti yaitu waktu dan tempat sehingga hasil penelitian kurang mendalam, apabila penulis tidak bisa menjelaskan secara meluas maka dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya.